

DATA RESPONDEN

Nurhadi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Wawancara, Tanggal 09 Maret 2022

Sopianto, Ketua BPD (Badan Pemusyawartan Desa), Wawancara, Tanggal 09
Maret 2022

Uli, Anggota BPD Desa Tanjung Merbu, Wawancara, Tanggal 09 Maret 2022

Muniarti, Ketua Keterwakilan perempuan Atau Sekretaris BPD, Wawancara,
Tanggal 12 Maret 2022

Juwita, Pencalon Badan Pemusyawratan Desa Keterwakilan Perempuan Tidak
Terpilih, Tanggal 14 Maret 2022

Rahmat, Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Merbu, Wawancara, Tanggal 15 Maret
2022

Herman, Kepala Desa Tanjung Merbu, Wawancara, 11 Maret 2022

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AMAL, P. D. (2006). *SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM*. Kebayoran Baru Jakarta Selatan: Komunitas Indonesia.
- Bungin, B. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Candra, A. (2018:42). *Kedudukan Wanita dalam Ranah Politik di Indonesia Menurut Pandangan Islam*. Palembang: CV.Amanah.
- faridah, H. (2018:138). *Kajian dan dinamika gender*. Jatim: Perpustakaan Nasional.
- Febriansyah, & Irawan, F. (2012). MUATAN KEPENTINGAN POLITIK PENENTU KUALITAS UNDANG-UNDANG. 187.
- Fernando, A. S. (2018). Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Pemikiran Politik Islam*.
- Firdaus, A. (2021). Gender dan Kapitalisme Isu Kontemporer Bidang Sosial-Politik. *Sipatokong BPSDM*.
- Maschab, M. (2013:3-8). *POLITIK PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA*. Yogyakarta: palgov.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2016:124). *Badan Pemusyawaratan Desa*.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujagjo, P. (1983:2). *peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa*. jakarta: cv. rajawali.
- Syam, F. (2003). YUSRIL IHZA MAHENDRA Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik. DKI Jakarta: Indocamp.

Thamrin, M. (2010:3). *PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAH*. JAKARTA: UNDP Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Banyuasin, p. k. (fungsi dan tugas BPD). Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Badan pemuswaratan Desa (BPD) "menuju Desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Palembang Sumatera.

Indonesia, R. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004. INDONESIA: REPUBLIK.*
UNDANG UNDANG DESA (UU No. 6 TAHUN 2014). (2014). JAKARTA: 80.

C. Jurnal

Bukido, R., Rivai , D. M., Makka , M. M., & Hasan , F. (2019). Ilmu dan Kepentingan Politik Tinjauan Hukum Islam . jurnal hukum islam, 72.

Cahyono, H. (n.d.). *KONFLIK ELIT POLITIK di PEDESAAN:RELASI ANTARA BADAN PERWAKILAN DESA DAN PEMERINTAH DESA.* 1.

HARYANI, R. (n.d.). *PELAKSANAAN PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TAHUN 2009 DI DESA MUARA DILAM KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU. SKRIPSI, 5.*

Mukarom, Z. (2008). *Perempuan dan politik:studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan perempuan di legislatif.*

Priambudi, K. N. (n.d.). *Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam badan Perwakilan di Desa dan Pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan permusyawaratan Desa. Perpustakaan airlangga.*

Roza, D., & DKK. (2017). *Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.*

Safitri, D. (2014). *Woman And Political Communication:Megawati dan pemimpin Simbolik . Komunikasi.*

Thamrin, M. (2010:3). *PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAH*. JAKARTA: UNDP Indonesia.

Toto Pribadi Ali Muhyidin, S. M. (n.d.). Pendekatan Analisis Sistem Politik.

Zainuddin, M., & Maisaroh, I. (2005). POSISI WANITA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi).

Zhong, Y., & Kim, J. (2005). Political Interest in Rural Southern Jiangsu Province In China. Journal Of Chinese Political Science.

D. Sumber Lainnya

WWW.KEMENPPPA.go.id

WWW.Banyuasinkab.Bps.go.id

[Https://web.id/politik.html](https://web.id/politik.html)